

**KATEGORI**

Sosial

**SUB KATEGORI**

Pendidikan

**NAMA INDIKATOR**

APM SMP/MTs/Paket B

**TAHUN**

2017

**KONSEP**

- **Angka Partisipasi Murni (APM) SMP** adalah perbandingan antara murid SMP, Madrasah Tsanawiyah, Paket B setara SMP, usia 13-15 tahun, dengan penduduk usia 13-15 tahun, yang dinyatakan dalam persentase. ? Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara jumlah sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu yang dinyatakan dalam persentase.
- **Sekolah Menengah Pertama (SMP)** adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus sekolah dasar (atau sederajat). Sekolah menengah pertama ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Pelajar sekolah menengah pertama umumnya berusia 13-15 tahun.
- **SMP** meliputi jenjang pendidikan SMP Umum, Madrasah Tsanawiyah, SMP kejuruan dan sederajat.
- **Madrasah Tsanawiyah (MTs)** adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
- **Paket B** adalah pendidikan yang sederajat dengan SMP/MTs.

**RUJUKAN**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Dan Tata Cara Evaluasi Ranperda Tentang RPJPD, RPJMD Dan Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Yang di Selenggarakan oleh Pusat Pendidikan Keuangan Dan Pelatihan Pemerintahan.

**RUMUS**

Jumlah Murid SMP/MTs Usia 16–18 Tahun

APM SMP/MTs = -----x100%

Jumlah Penduduk Usia 16–18 Tahun

**WALI DATA**

BPS Kabupaten Pematang

**UKURAN**

Persen (%)

## **UNIT**

Seksi Statistik Sosial

## **KEGUNAAN**

Memonitor pencapaian tujuan pendidikan dasar yang diidentifikasi dalam MDGs khususnya pendidikan tingkat SMP dalam program nasional (Indonesia)

## **INTERPRETASI**

Pendidikan adalah salah satu aspek penting dari pembangunan manusia. Menghilangkan ketimpangan gender di semua jenjang pendidikan akan meningkatkan status dan kemampuan perempuan dan laki-laki untuk berperan dalam pembangunan ekonomi. Rasio APM perempuan terhadap laki-laki pada jenjang pendidikan tertentu, misalnya SMP menunjukkan angka di bawah 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pada jenjang pendidikan SMP lebih banyak murid laki-laki yang bersekolah dibandingkan dengan murid perempuan. Sebaliknya, rasio APM perempuan terhadap laki-laki menunjukkan angka di atas 100 persen menggambarkan murid perempuan lebih banyak dibandingkan murid laki-laki pada jenjang pendidikan tersebut

## **KETERANGAN**

-

## **SUMBER**

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

## **METODOLOGI**

- Metode pemilihan sampel dalam studi ini dilakukan dalam 6 tahap. Pada tahap pertama dipilih 7 propinsi secara purposive (sengaja) namun dapat mewakili wilayah barat dan timur Indonesia, serta wilayah urban dan rural. Ketujuh propinsi tersebut adalah Sumatera Selatan, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur (mewakili wilayah barat), Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan (mewakili wilayah timur). Tahap kedua adalah memilih 2 kabupaten/kota dari masing-masing propinsi kecuali DKI Jakarta 3 kota secara purposive. Dari masing-masing kabupaten/kota, dipilih sampel 2 kecamatan secara purposive. Sampai dengan tahap ketiga, pemilihan sampelnya dilakukan BPS Pusat.
- Selanjutnya tahap keempat, yaitu pemilihan desa dilakukan oleh petugas BPS Propinsi dimana pada setiap kecamatan dipilih 2 desa. Tahap kelima adalah pemilihan 2 Rukun Tetangga (RT) pada setiap desa yang dilakukan oleh petugas lapangan (BPS Kabupaten/Kota) dengan pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat RT tersebut heterogen. Tahap terakhir (keenam) adalah pemilihan rumah tangga dimana pada setiap RT dipilih 30 rumah tangga dengan cara systematic sampling yang distratakan berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Pemilihan sampel rumah tangga didasarkan pada hasil pendaftaran rumah tangga di masing-masing RT. Perhitungan interval sampel dan pemilihan angka random pertama (R1) untuk pemilihan sampel rumah tangga dilakukan pada setiap RT terpilih.
- Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung (tatap muka) antara pencacah dengan responden dengan menggunakan kuesioner. Responden dari rumah tangga terpilih adalah kepala rumah tangga, suami/istri, atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui secara persis karakteristik rumah tangga bersangkutan.

## **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Provinsi, Nasional

**PERIODE**

Tahunan

**LAG DATA**

H+1

**KEWENANGAN**

BPS RI

**DOKUMEN**

SIPD, LPPD

